

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada era globalisasi saat ini, tuntutan terhadap paradigma *Good Governance* dalam seluruh kegiatan tidak dapat dielakan lagi. Istilah *Good Governance* sendiri merupakan system pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan, maupun ditinjau dari “nilai-nilai” yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri. Penerapan *Corporate Governance* menjadi sangat penting bagi perusahaan yang salah satu tujuannya adalah untuk menekan potensi konflik kepentingan.

Perusahaan perlu penerapan *Corporate governance* untuk meningkatkan kewenangan yang dimiliki para pemegang saham publik dalam rangka menyeimbangkan pihak manajemen. Agar perusahaan memiliki kelangsungan yang jangka panjang, *stakeholders* and *shareholders* perlu mempertimbangkan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*). Jika kondisi *Good Governance* dapat dicapai maka terwujudnya negara yang bersih dan responsif (*clean and responsive state*) yaitu Negara yang bersih dari tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yaitu system tata kelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan dalam jangka panjang dengan tetap memperlihatkan *stakeholder* seperti kreditur, pemasok, konsumen, karyawan, pemerintah, dan masyarakat. Pengaruh globalisasi juga memicu para pelaku bisnis dan ekonomi untuk melakukan berbagai tindakan agar bisnisnya tetap dapat bertahan didunia bisnis agar tujuannya dapat tercapai maka kegiatan usahanya harus efektif dan efisien.

Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) diperlukan perusahaan untuk mekanisme pengendalian untuk mengatur dan mengelola bisnis dengan maksud memakmurkan dan akuntabilitas perusahaan yang tujuan akhirnya adalah

meningkatkan *shareholder value*. Sistem *Governance* mengatur cara pengambilan keputusan pada tingkat atas dalam suatu organisasi.

Dengan *Good Corporate Governance*, pengambilan keputusan yang hanya ditetapkan oleh satu pihak yang memiliki kedudukan tertinggi, tetapi keputusan akan dibuat setelah mendapatkan masukan dari berbagai *stakeholders* dan juga dengan mempertimbangkan kepentingan dari *shareholders*. Dengan cara itu juga mendorong pengelolaan organisasi yang demokratis, *accountable* dan transparan.

Kejadian yang menimpa perusahaan besar seperti Enron Corporation mendapat perhatian luas dari masyarakat dan merupakan contoh nyata yang dapat kita lihat atas kegagalan dalam meningkatkan *Good Corporate Governance*.

Sistem *Good Corporate* yang baik memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan kreditor sehingga mereka bisa meyakinkan dirinya akan perolehan kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Oleh karena itu, sistem tersebut juga harus membantu menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap pertumbuhan sektor usaha yang efisien dan *going concern*.

Laporan yang diterbitkan oleh *Corruption and Fraud in Internasional Aid and Business Projects* (Kramer, 2002) mengemukakan 10 negara terkorup dan Indonesia menduduki urutan ke empat sebagai *Most Corrupt Countries*. Hasil-hasil survey memberikan pertanda bahwa sudah saatnya organisasi dan perusahaan di Indonesia di dorong untuk segera memperbaiki kualitas penerapan *Good Corporate Governance*-nya.

Good Corporate Governance sering diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik. Namun pada umumnya telah disepakati bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (keputusan menteri BUMN/ Nomor 117 / M / MBUI / 2002, tgl 1 Agustus 2002) telah mencakup trnsparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

Pemerintah melalui Kementrian Negara BUMN mulai memperkenalkan konsep *Good Corporate Governance* ini dilingkungan BUMN, sebagai salah satu upaya untuk mendukung pencapaian penerapan/pendapatan Negara, sekaligus menghapuskan berbagai bentuk praktik inefisiensi, korupsi, kolusi, nepotisme dan

penyimpangan lainnya untuk memperkuat daya saing BUMN menghadapi pasar global.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dapat diterapkan dengan baik apabila perusahaan memiliki pengendalian intern yang efektif. Pengendalian intern yang efektif diperlukan oleh semua aspek usaha, terutama melibatkan penggunaan harta perusahaan.

Melihat pentingnya pengendalian internal terhadap penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, *Good Corporate Governance* harus difungsikan sebagai penilaian yang independen dalam membantu manajemen dalam melakukan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh pengendalian intern dalam meningkatkan *Good Corporate Governance* yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul :

“PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DALAM MENINGKATKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut penulis mengidentifikasi masalah yang diteliti, yaitu :

1. Apakah Pengendalian Intern di perusahaan sudah efektif.
2. Apakah *Good Corporate Governance* pada perusahaan sudah diterapkan dengan baik.
3. Apakah Pengaruh Pengendalian Intern dalam meningkatkan *Good Corporate Governance* pada perusahaan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan diatas, yaitu mencari data mengenai pengaruh pengendalian intern pada suatu perusahaan khususnya pada perusahaan BUMN dan mengukur pengaruhnya dalam meningkatkan *Good Corporate Governance* perusahaan.

Adapun tujuan dari penelitian diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengendalian intern di perusahaan sudah efektif.
2. Bagaimana efektifitas *Good Corporate Governance* pada perusahaan sudah diterapkan dengan baik.
3. Mengetahui pengaruh pengendalian intern dalam meningkatkan *Good Corporate Governance* pada perusahaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Pengembangan ilmu
 - a. Penelitian ini akan berguna untuk melatih diri dan menganalisis suatu permasalahan secara ilmiah dan sistematis dalam bentuk penulisan skripsi.
 - b. Bagi peneliti lain dan pihak-pihak yang memerlukan dapat digunakan sebagai sumber referensi dari informasi yang juga dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.
2. Pengembangan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bagi perusahaan dapat memperluas wawasan manajemen akan perlunya sistem *Corporate Governance* dan sebagai bahan pertimbangan, jika perlu dapat dipakai untuk mengadakan perbaikan agar dapat meningkatkan nilai perusahaan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pengendalian intern diciptakan agar aktifitas operasional perusahaan dapat terkendali dan dilakukan oleh semua elemen-elemen yang ada dalam perusahaan. Pengendalian intern harus dapat terlaksana secara efisien dan efektif karena menyangkut pada harta perusahaan, karena apabila pengendalian intern terlaksana

sesuai dengan yang telah ditetapkan maka perusahaan diharapkan dapat lebih meningkatkan *Good Corporate Governance* di dalam perusahaan.

Pengertian pengendalian intern menurut SPAP NO.69 yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia adalah:

“ Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: a. Keandalan pelaporan keuangan, b. Efektifitasnya dan efisiensi operasi dan c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku” (IAI SPAP : 2001)”.

Pengendalian internal dibagi menjadi 5 komponen yang saling terkait yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penaksiran risiko
3. Aktivitas pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara, menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Good Corporate Governance diartikan secara sempit sebagai pertanggungjawaban resmi direksi kepada pemegang saham. Sementara itu secara luas diartikan sebagai sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholders value*) serta mengalokasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) seperti kreditor, *supplier* asosiasi, usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.

Corporate Governance menurut OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) dikutip dari Indra dan Ivan Y (2006) yaitu:

“Sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board* dan pemegang saham dan pihak yang berkepentingan dengan perusahaan”.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) pengertian *Corporate Governance* adalah :

“ Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu system yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* adalah untuk menciptakan pertambahan nilai bagi semua pihak pemegang kepentingan”.

Dalam praktiknya *Good Corporate Governance* merupakan acuan tertulis (pedoman) mengenai kesepakatan antar para *stakeholders* dalam mengidentifikasi dan merumuskan keputusan-keputusan stratejik secara efektif dan terkoordinasi (Hitt dkk, 2000).

Dengan bekal dari pedoman tersebut maka dapat dibangun saling kepercayaan antara pemilik perusahaan dan para pimpinan perusahaan (Dewan Direksi dan para Manajer tingkat puncak). Guna mengawasi lebih lanjut kinerja perusahaan dan menjaga kepentingan para pemilik modal secara profesional, maka pemilik perusahaan melalui RUPS, mengangkat anggota komisaris untuk duduk dalam Dewan Komisaris.

Menurut konsep *Good Corporate Governance* perusahaan akan memperoleh nilai perusahaan (*value of the firm*) yang maksimal apabila fungsi dan tugas masing-masing pelaku organisasi bisnis yang modern dapat dipisahkan dengan membentuk:

(1) *Board of Directors*, dengan syarat mereka bekerja *full time* dengan tidak boleh merangkap pekerjaan. Mereka mengelola perusahaan melalui berbagai keputusan managerial stratejik perusahaan.

(2) *Board of Commisionners* (BOC), meliputi komisaris biasa dan Komisaris Independen serta berbagai komite yang dibentuknya yang salah satunya adalah Komite Audit. Fungsi utama BOC adalah mengawasi arah kepengusahaan dan jalannya perusahaan menurut prinsip-prinsip GCG.

Good Corporate Governance juga mensyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan, dan pengawasan atas kinerja *good corporate* yang baik dapat memberikan perangsangan atau insentif yang baik bagi *board* dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham dan harus memfasilitasi pemantauan yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang efisien. Untuk meningkatkan *corporate governance* yang baik harus melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang pada dasarnya terdapat lima prinsip utama yaitu *fairness*, *transparency*, *independency*, *accountability*, dan *responsibility*.

Fairness adalah prinsip yang memberikan pengakuan yang sama terhadap semua pemegang saham maupun investor. *Transparency* maksudnya agar dalam mengelola perusahaan, manajemen mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material kepada pemegang saham investor. *Independency* yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. *Accountability* maksudnya setiap langkah yang diambil manajemen dalam mengelola perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan *Responsibility* adalah kesesuaian dalam mengelola perusahaan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Kewajiban anggota direksi, komisaris atau dewan pengawas untuk melaksanakan *good corporate governance* saat ini sudah sewajarnya dilakukan dan tidak berlebihan.

Penelitian ini dikembangkan oleh **Angga** dari Universitas Widyatama tahun 2008 berjudul **"Pengaruh Audit Internal Terhadap Peningkatan *Good Corporate Governance*"** survey pada PT.PINDAD (Persero).

Yang diteliti oleh peneliti terdahulu yaitu:

1. Variabel bebas (Independent variabel) : audit internal
2. Variabel tak bebas (Dependent variabel) : *Good Corporate Governance*

Kesimpulan yang diperoleh penelitian terdahulu menyatakan pelaksanaan audit internal terhadap peningkatan *Good Corporate Governance* yang dilakukan auditor internal dinilai memadai.

Perbedaan penelitian sekarang dengan yang terdahulu adalah pada variabel *independent (X)*, penelitian terdahulu memfokuskan pada pengaruh audit internal pada perusahaan, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis sekarang yaitu lebih memfokuskan pada pengaruh pengendalian internal pada perusahaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis akan mencoba meneliti hal tersebut melalui sebuah penelitian yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul:

”Pengaruh Pengendalian Intern dalam Meningkatkan *Good Corporate Governance*”.

1.6 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif melalui pendekatan studi kasus. Dengan demikian tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Jadi data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan, dipelajari, dianalisis dan dibandingkan dengan teori yang telah dipelajari oleh penulis.

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu pengumpulan data secara langsung dan mengadakan penelitian terhadap objek yang dilakukan dengan :

a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pejabat yang berwenang atau bagian yang berwenang atau bagian yang berhubungan langsung dengan masalah tersebut.

b. Kuesioner

Yaitu membuat daftar pertanyaan yang ditujukan kepada pimpinan dan personil perusahaan yang dianggap mampu dan berwenang dalam memberikan jawaban yang diperlukan.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu pengumpulan data dengan mencari dan mempelajari bahan-bahan dan membandingkan dengan beberapa sumber kepustakaan, seperti buku literatur, majalah-majalah dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini, penulis merencanakan akan melakukan penelitian pada PT. PINDAD (Persero) yang berada di Jalan Gatot Subroto 517 Bandung 40284. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai dengan selesai.